

**DETERMINAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
(Sebuah Bukti Empiris)**

**DETERMINANTS OF CHANGES IN THE REGIONAL EXPENDITURE
BUDGET
(An Empirical Evidence)**

Fadhlon Ramadhan¹, Syukriy Abdullah¹ Syukur Selamat Karo-karo², Riha Dedi
Priantana¹

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK

2). Inspektorat Aceh Tenggara

E-mail: [:syukriyabdullah@unsyiah.ac.id](mailto:syukriyabdullah@unsyiah.ac.id).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan anggaran pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan sisa anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja (PAB) pada pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia yang diperoleh melalui internet untuk tahun anggaran 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota dengan sampel sebanyak 70 pemerintah daerah, yang dipilih secara *purposive* dengan pencarian di Google. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DP, dan SiLPA secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Implikasi terhadap riset berikutnya adalah perlunya dilakukan analisis mendalam tentang kebijakan perubahan anggaran belanja yang dikaitkan dengan anggaran pendapatan awal dan SiLPA karena adanya kecenderungan terjadi *moral hazard* dalam proses penentuan prioritas belanja daerah pada pejabat daerah.

Kata kunci: prioritas belanja, masalah keagenan, SiLPA, pendapatan transfer, perilaku oportunistis.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of changes in the regional original revenue budget (PAD), balancing funds (DP), and remaining budget (SiLPA) on changes in the regional government budget (PAB). The secondary data used by the government is sourced from regulatory documents regarding Changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Indonesia which were obtained via the internet for the 2013 fiscal year. The population in this study were districts/cities with a sample of 70 regions, which were selected purposively by searching on Google. Hypothesis testing using multiple linear regression model. The results of the analysis show that PAD, DP, and SiLPA individually and jointly have an effect on changes in regional budgets. The implication for the next research is the need for an in-depth analysis of future budgetary

policies and SiLPA because of the tendency of moral hazard in the regional spending process for regional officials.

Keywords: spending priorities, agency problems, SiLPA, income transfer, opportunistic behavior.

PENDAHULUAN

Perubahan anggaran daerah³ merupakan fenomena yang rutin dilakukan dalam penganggaran pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, namun mengandung persoalan-persoalan keagenan (*agency problems*) yang berpangkal dari kepentingan politik dan prinsip aji mumpung (*opportunistic behavior*). Selain menjadi ruang untuk memperbaiki kinerja anggaran daerah (Anessi-Pessina, et al., 2012), juga menjadi kesempatan untuk mengeksekusi kepentingan jangka pendek para *budget actors* (Abdullah, 2013). Ketidakakurasian dalam memprediksi kebutuhan anggaran ril pada saat penyusunan anggaran awal dapat diperbaiki melalui penyesuaian anggaran ini (Forrester & Mullins, 1992).

Perubahan anggaran belanja daerah berkaitan dengan realisasi pendapatan dan belanja di semester pertama tahun berjalan dan perubahan asumsi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan yang telah ditetapkan pada

akhir tahun sebelumnya. Perubahan anggaran belanja yang disebabkan oleh realisasi pendapatan dan belanja selama satu semester pertama tahun berjalan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diperoleh capaian kinerja seratus persen (jumlah rupiah dalam anggaran dan realisasinya sama).

Realisasi PAD pada semester pertama tidak selalu sama dengan anggarannya dikarenakan adanya kecenderungan terjadi *overestimate* atau *underestimate* dalam penentuan targetnya (terjadi *budget slack*). Ketidakakurasian dalam menentukan target PAD ini sering menjadi pertimbangan penting dalam penyesuaian anggaran di tahun berjalan. Persoalan keagenan sering muncul dipihak eksekutif (sebagai *agent*) dalam pengusulan target PAD karena potensi sesungguhnya tidak diketahui oleh legislatif (sebagai *principal*). Asimetri informasi yang terjadi menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat juga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran belanja daerah (Abdullah & Halim, 2003; Nawawi, 2021). Penyesuaian atas dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya untuk dana bagi hasil (DBH), menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap belanja daerahnya. Sebagian komponen DBH sudah diperuntukkan penggunaannya (*erarmark*), sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pergeseran belanja atau menambah alokasi belanja untuk kegiatan baru.

Perubahan anggaran juga terjadi karena alasan asumsi anggaran awal yang ditetapkan sebelumnya yang tidak sesuai dengan kenyataan riil, dan dilakukan setelah hasil audit oleh pemeriksa eksternal diperoleh, khususnya terkait kepastian tentang besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang ditetapkan dalam hasil audit tersebut merupakan angka definitif atau permanen, sementara SiLPA dalam APBD tahun berjalan masih bersifat tentatif atau prediksi di akhir tahun sebelumnya. SiLPA dalam APBD awal mengandung persoalan keagenan karena dapat digunakan untuk “menampung” kepentingan para pembuat

anggaran, terutama politisi (Fozzard, 2001; Isaksen, 2005).

Fenomena perubahan anggaran pemerintah dengan menggunakan perspektif hubungan keagenan (*principal-agent relationship*) belum banyak diteliti, khususnya untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia. Analisis ini penting dilakukan untuk memahami perilaku dalam pembuatan kebijakn pengalokasian sumberdaya, khususnya dalam tahun berkenaan melalui revisi anggaran yang jarang mendapat sorotan publik. Beberapa studi terdahulu yang menguraikan masalah ini diantaranya adalah Asmara (2010), Abdullah & Rona (2014), Martunis, et al. (2014), Amran, et al. (2015), Junita (2015), Junita & Abdullah (2016), Nellyanti, et al. (2016), Adi (2018), dan Junita, et al. (2018). Proses penyusunan APBD murni dan perubahan sebenarnya tidak berbeda (Anessi-Pessina, et al., 2012), politik dan atensi publik sering melihatnya berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan sisa anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja (PAB) dan memberi bukti empiris bahwa PAD, DP dan SiLPA berpengaruh terhadap PAB. Hasil ini bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk lebih cermat dalam mengalokasikan

sumber penerimaan ke dalam belanja sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se Indonesia yang berjumlah 491 Kabupaten dengan sampel sebanyak 70 pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang ditetapkan adalah (1) kabupaten/kota yang memiliki defisit anggaran pada tahun 2016 dan (2) perda tentang perubahan APBD bisa diakses/diunduh melalui internet dengan menggunakan mesin pencari google.com.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan anggaran belanja (PAB). PAB diukur dengan cara menghitung selisih antara angka anggaran belanja setelah perubahan dengan angka anggaran belanja sebelum perubahan atau angka anggaran belanja dalam APBD murni (awal tahun).

Selain itu, variabel Independen dalam penelitian ini adalah sisa anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan. Sisa Anggaran (SPA). Sisa anggaran, sering juga disebut SiLPA,

adalah kas daerah yang belum terpakai atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran yang dapat dipakai pada tahun anggaran berikutnya. Pada awal tahun anggaran berikutnya, sisa anggaran ini akan menjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu). Sisa anggaran dalam penelitian ini diukur dengan menghitung selisih antara SiLPA dalam APBD Perubahan dengan SiLPA dalam APBD murni. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan menghitung selisih antara PAD dalam APBD perubahan dengan PAD dalam APBD murni. Dana Perimbangan (DBH). Variabel dana perimbangan diukur dengan menggunakan selisih antara dana bagi hasil (DBH) dalam APBD-P dengan DBH dalam APBD murni.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan seperti berikut:

$$PAB_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_1 SPA_1 + \beta_2 PAD_2 + \beta_3 DBH_3 + \varepsilon_{i,t}$$

dengan $\alpha_{i,t}$ adalah konstanta; β_1 adalah koefisien regresi SiLPA; β_2 adalah koefisien regresi PAD; β_3 adalah koefisien regresi DBH; dan $\varepsilon_{i,t}$ adalah *error terms*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Statistik deskriptif

No.	Nama Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Simpangan Baku
1.	Perubahan Sisa Anggaran (SPA)	70	0	220.755.627.297	29764472186,63	39240260672,350
2.	Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70	0	43920576144	6757061014,49	8412163721,306
3.	Perubahan Dana Perimbangan (DP)	70	-54416193600	507852358407	26160076742,66	87232217066,678
4.	Perubahan Anggaran Belanja (PAB)	70	-27410499211	407110610050	90733396031,87	84339074266,190

Sumber: Data Penelitian (Diolah)

Sebanyak 70 sampel yang disertakan dalam penelitian ini, diperoleh nilai rata-rata Perubahan Belanja Daerah sebesar Rp90733396031,87 atau sebesar Rp90,733 milyar, nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data variabel belanja daerah mengindikasikan hasil yang baik, hal tersebut dikarenakan nilai kesenjangan antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada belanja daerah tinggi.

Nilai minimum belanja daerah sebesar Rp392.572.404.842, diperoleh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2011 dan nilai belanja daerah yang tertinggi sebesar Rp3.490.591.534.327 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011.

Sampel yang diikutsertakan pada penelitian ini sebanyak 70 sampel, diperoleh nilai rata-rata selisih sisa anggaran sebesar Rp2.976.4472.186,63, standar deviasi sebesar Rp39.240.260.672,350 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai rata-rata yang mengindikasikan hasil yang kurang baik.

Nilai minimum perubahan sisa anggaran (SiLPA) sebesar Rp0,00

diperoleh Kota Purwakarta pada tahun 2010 dan Kabupaten Surabaya pada tahun 2012, dan nilai perubahan sisa anggaran (SiLPA) tertinggi sebesar Rp1.155.339.962.159 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011.

Pada variabel pendapatan asli daerah (PAD), diperoleh nilai rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6.757.061.014, nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yaitu sebesar Rp8.412.163.721,306 menunjukkan bahwa data variabel pendapatan asli daerah mengindikasikan hasil yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Nilai minimum perubahan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp0,00 diperoleh Kota Tanggamus pada tahun 2010 dan nilai perubahan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp43.920.576.144 diperoleh Kabupaten Bandung pada tahun 2012.

Kemudian pada variabel dana perimbangan, diperoleh nilai rata-rata dana perimbangan sebesar Rp26.160.076.742,66, nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yaitu sebesar Rp87.232.217.066,678 menunjukkan bahwa data variabel dana perimbangan mengindikasikan hasil yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Nilai minimum perubahan dana perimbangan sebesar Rp54.416.193.600 diperoleh Kabupaten Purwakarta pada

tahun 2010 dan nilai perubahan dana perimbangan tertinggi sebesar Rp2.357.186.182.407 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Hasil pengolahan data menghasilkan informasi dan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persamaan Regresi Hasil Pengolahan Data

PAB = 38016494306,82 + 0,844SPA + 3,019PAD + 0,275DP + ε				
<i>t-value</i>	3,391	3,961	3,061	2,996
<i>Sig.</i>		0,000	0,003	0,004
<i>F-value/Sig.</i>	15,688/0,000			
<i>R/R²/Adjusted R²</i>	0,645/0,416/0,390			

Sumber: Data Diolah (2014)

Tabel 2 menyajikan persamaan regresi yang merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta (α) adalah sebesar 38.016.494.306,82, yang bermakna jika SPA, PAD, dan DBH dianggap konstan maka perubahan belanja daerah yang terjadi adalah sebesar 38.016.494.306,82.

Berdasarkan nilai *Sig.* sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama maupun secara parsial, perubahan SPA, perubahan PAD, dan DBH berpengaruh terhadap PAB. Hal ini menggambarkan bahwa setiap perubahan nilai anggaran, baik itu bertambah ataupun berkurang pada sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil, akan mengakibatkan

berubahnya nilai alokasi belanja daerah dalam APBD-P.

Hasil regresi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,416 atau 41,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 41,6% PAB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu SPA, PAD, dan DBH, sedangkan 58,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa SPA, PAD, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap perubahan alokasi belanja dalam penganggaran daerah dimana nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan anggaran, baik itu bertambah ataupun berkurang pada sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan, akan mengakibatkan berubahnya nilai alokasi belanja daerah dalam APBD-P.

Pengaruh Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Belanja

Besaran koefisien regresi SPA adalah sebesar 0,844, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam

variabel SPA atau SiLPA sebesar 0,844 satuan maka akan menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja daerah sebesar 1 satuan. Pengaruh SPA terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. yang diperoleh adalah 0,000. Artinya, pada level signifikansi 5%, SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan SiLPA (atau SPA) berpengaruh terhadap perubahan belanja. Dalam hal ini, sisa anggaran tahun sebelumnya direvisi dalam tahun anggaran berjalan, menyebabkan perubahan belanja. Perubahan SiLPA terjadi karena besaran yang diestimasi pada saat penyusunan anggaran tahun berjalan pada akhir tahun sebelumnya belum dapat memastikan besaran SiLPA sesungguhnya. Jumlah SiLPA yang pasti baru diketahui setelah hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah diketahui.

Perubahan belanja yang disebabkan oleh sisa anggaran seperti yang diuji dalam penelitian ini, membuktikan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya penting untuk pembiayaan di tahun berjalan, sehingga harus dikelola dengan baik. Prediksi atas besaran SiLPA tahun berjalan yang akan dimasukkan ke dalam tahun anggaran berikutnya (pada saat

penyusunan APBD tahun berikutnya), harus dilakukan secara cermat. Pada kenyataannya, beberapa daerah sengaja mengecilkan estimasi SILPA agar pada tahun berikutnya dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran dengan tujuan tertentu.

Pengaruh Perubahan PAD terhadap Perubahan Belanja

Besaran koefisien regresi PAD adalah sebesar 3,019, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam variabel PAD sebesar 3,019 satuan, maka akan menyebabkan terjadinya PAB sebesar 1 satuan. Pengaruh PAD terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. dan nilai t statistik yang diperoleh masing-masing adalah 0,003 dan 3,061. Artinya, pada level signifikansi 5%, perubahan dalam PAD berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan PAD yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pos belanja juga sangat penting untuk diperhatikan. Perubahan PAD dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran. Dalam hal ini bisa saja terjadi target PAD memang sengaja di *underestimate* (Abdullah, 2013) yang mana dapat

dinaikkan pada saat APBD-P dengan dasar tidak terprediksinya sumber penerimaan baru, dan kemudian dimasukkan ke dalam perubahan belanja.

Kebijakan penganggaran untuk PAD mengandung beberapa persoalan keagenan (*agency problems*), seperti adanya senjangan anggaran (*budget slack*) sebagai akibat adanya hasrat pada diri pengusul dan pelaksana anggaran untuk mencapai target secara lebih baik dengan lebih mudah (Halim & Abdullah, 2010). Artinya, kinerja yang baik ditunjukkan dari pencapaian realisasi PAD yang melampaui target PAD. Oleh karena itu, eksekutif selaku perencana, pengusul, pelaksana, dan juga penanggungjawab PAD cenderung mengusulkan target PAD yang jauh di bawah potensi PAD yang sesungguhnya (Abdullah & Nazry, 2014).

Pengaruh Perubahan Dana Perimbangan terhadap Perubahan Belanja

Besaran koefisien regresi DBH adalah sebesar 0,275, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam variabel DBH sebesar 0,275 satuan, maka akan menyebabkan terjadinya PAB sebesar 1 satuan. Pengaruh DBH terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig.

yang diperoleh adalah 0,004. Artinya, pada level signifikansi 5%, perubahan dalam dana perimbangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja dalam APBD-P terutama terjadi pada DBH. DBH selalu mengalami revisi dalam APBD-P daerah kabupaten/kota karena adanya penyesuaian transfer dari Pemerintah Pusat. Perubahan penerimaan yang berasal dari penyesuaian (biasanya berupa tambahan) ini dapat digunakan untuk belanja apa saja, kecuali disebutkan perubahan DBH tersebut harus dialokasikan untuk belanja tertentu. Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Marzalita, et al. (2014) yang menyatakan bahwa perubahan DBH tidak berpengaruh terhadap perubahan belanja barang dan jasa.

Fleksibilitas dalam penggunaan perubahan (tambahan) DBH mengandung risiko berupa ketidaktepatan dalam pengalokasian dana tersebut dalam anggaran belanja. Oleh karena perubahan DBH sering terjadi di semester pertama tahun berjalan, maka proses pengalokasian di dalam APBD tidak terlalu berisiko karena masih dapat dibahas oleh kepala daerah dan DPRD

dalam perubahan anggaran tahun berjalan. Biasanya pemerintah daerah menggunakan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai dasar untuk menggunakan tambahan dana tersebut, sebelum dilakukan perubahan dalam KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja daerah (PAB) dipengaruhi oleh sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan (DP). Hasil ini memiliki implikasi pada keharusan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam melakukan perubahan anggaran karena tidak semua perubahan harus berupa peningkatan anggaran belanja untuk semua jenis belanja.

Disarankan untuk perumusan kebijakan anggaran di pemerintah daerah, perlu dilakukan kajian tentang perilaku perubahan belanja yang dikaitkan dengan kualitas anggaran belanja yang diajukan dalam anggaran murni (APBD awal). Perilaku *moral hazard*, terutama di SKPD perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait motivasi dalam membuat anggaran belanja yang digelembungkan (*mark-up*). Kajian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk

mengetahui ketidaktepatan dalam penggunaan jenis-jenis pendapatan ke dalam belanja-belanja tertentu. Kebijakan *earmark* atau labeling diperlukan untuk tujuan tertentu agar tidak menyalahi filosofi pengelolaan keuangan daerah yang sejatinya merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk menuju visi masyarakat yang sejahtera.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) menggunakan data yang relatif sedikit, sehingga memiliki kelemahan dalam generalisasi hasil penelitian; (2) menggunakan data sekunder yang tidak sepenuhnya dapat menangkap fenomena perilaku oportunistik dalam penganggaran untuk perubahan anggaran; dan (3) cenderung hanya menggunakan data Pemda yang memiliki transparansi relatif bagus, karena menyajikan informasi APBD dan perubahan APBDnya secara online, setidaknya bisa diperoleh dengan mesin pencari Google.com.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. 2011. *Penilaian Kinerja Keuangan Daerah*. Web: <<http://syukriy.wordpress.com/2011/11/29/penilaian-kinerja-keuangan-daerah/>> [10/10/13].

_____. 2012. *Perilaku Opportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

_____. 2013a. *Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah: Apakah Saling Berhubungan*. Web: <<https://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apaakah-saling-berhubungan/>> [29/11/21].

_____. 2013b. *Perubahan APBD*. Melalui <<https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>> [29/11/21].

_____. 2013c. *Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Masalah Keagenan yang Tidak Tuntas*. Web: <<http://syukriy.wordpress.com/>> [20/13/13].

_____. 2013d. *Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja*. Web: <syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/>.

_____. & Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64. Web: https://www.researchgate.net/publication/255967655_Hubungan_Dan_Masalah_Keagenan_Di_Pemerintahan_Daerah_Sebuah_Peluang_Penelitian_Anggaran_Dan_Akuntansi

_____. & Afrah Junita. 2020. Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13(1): 109-124.

_____, Mirza Khairul Reza, Afrah Junita, & Tuti Meutia. 2020. Parliament Oversight on Local Government Financial Management: An Empirical Evidence. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5(3): 296-312.

_____. & Neza Muthia. 2017. Determinan Saldo Kas Akhir Tahun pada Pemerintah Daerah di Aceh. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 21(2): 130-140. Web:

- <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/8613>. DOI: <https://doi.org/10.20885/jaa.vol21.iss2.art5>.
- _____ & Ramadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Makalah* disajikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAD Wilayah DKI Jakarta & Banten, di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 27 Februari 2014.
- Abidin, Handa S. 2012. Definisi Belanja Daerah. Web: <http://penelutihukum.org/tag/definisi-belanja-daerah/> [11/10/13].
- Adi, Priyo Hari. 2018. Rent-Seeking Behaviour in Local Government Budget in Indonesia. *Dissertation*. Melbourne: Victoria Graduate School of Business, College of Business, Victoria University.
- Amran, A., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2015. Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4(1): 1-10.
- Asmara, J.A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3 (2): 155-172.
- Cornia, G.C., R.D. Nelson, & A. Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review* 64 (2):164-179. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2004.00358.x.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz & Isabel-Maria Garcia-Sanchez. 2018. Conditional Factors of Political Budget Cycles: Economic Development, Media Pressure, and Political Fragmentation. *Public Performance & Management Review* 41(4): 835–858. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1465829>.
- Forrester, J.P. and D.R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52 (2): 467-473. DOI: 10.2307/976806.
- Hadinata, Fristian. 2013. Analisis Hubungan Surplus/Defisit dengan SILPA pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Isaksen, Jan. 2005. The Budget Process and Corruption. *Working paper U4 Issue 3:2005*. www.U4.no.
- Junita, Afrah. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 4(2): 366-375.
- Junita, Afrah & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Fiscal Stress dan Legislature Size terhadap Expenditure Change pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi* 20(3): 477-478.
- Junita, Afrah, E. Erlina, & Syukriy Abdullah. 2018. The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 162-173
- Kurniawan, Arief & Fefri Indra Arza. 2019. Pengaruh *Fiscal Stress*, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah:

- Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3): 1275-1292.
- Lee, R.D. & R.W. Johnson Jr. 2012. *Public Budgeting Systems*. Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication, Inc.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marzalita, M., N. Nadirsyah, & Syukriy Abdullah. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3(3): 46-58.
- Nawawi, Ahmad. 2021. Analisis Respon Belanja APBD terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3(1): 39-55.
- Nellyanti, N., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(2): 68-78.
- Pessina, Eugenio-Anessi. 2012. *Rebudgeting in Italian Municipalities: Magnitude and Drivers*. Working Paper.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos & Günther G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Local Indonesia. *Occasional Paper No. 17*. University of Freiburg.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Universitas Pattimura* 1(2): 142-155.
- Wildavsky, Aaron, 1988. *The New Politics of the Budgetary Process*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.